

MENTAL PERUBAHAN MENUJU MUTU PENDIDIKAN ISLAM

Abstract

Oleh:
Maskuri
Minhaji

Email:
masykuri.ismail@gmail.com
mun_minhaji@yahoo.co.id

Fakultas Tarbiyah Universitas
Ibrahimi di Situbondo

Fakultas Tarbiyah Universitas
Ibrahimi di Situbondo

Education quality studies are always dynamic, because the quality character always keeps up the times. Society demands for the implementation of Islamic education quality should be responded to well. Preparing and creating an atmosphere of quality culture in educational environment by mental change is the necessity. Efforts to forming the quality of education must begin by education providers. Islamic boarding schools as the one form of Islamic educational institutions, with Kyai as central figures are very important in responding any changes towards quality in education. Mental and quality culture also accompany management in Islamic education. Adequate professionalism and skills are the investment of resources which also determines quality of Islamic education. For this reason, the values of Islamic teachings contained in Alqur'an concerning quality, management, and change should be contextual.

Keywords: Quality, Islamic Education, Quality Policy, and Change Management

PENDAHULUAN

Mutu dalam percakapan sehari-hari sering dimaksudkan sebagai suatu yang absolut. Sebagai contoh mutu adalah bila kita merasakan makanan enak di sebuah restoran atau rumah makan. Kesan yang terucap adalah makanan ini sedap, pasti bermutu, dikerjakan oleh juru masak profesional. Bila kita melihat mobil mewah, rasanya ingin berucap mobil itu pasti bermutu karena yang menumpang akan merasakan kenyamanan. Realita ucapan tersebut digunakan sebagai standar mutu yang selalu identik dengan mewah, cost yang tidak sedikit, dan tidak dapat diungguli.¹ Dalam hal pendidikan, masyarakat akan mengatakan, lulusan lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika peserta didik melanjutkan studi di perguruan tinggi terkenal. Jika bekerja dalam sebuah perusahaan, bukan pada level pekerja kasar. Dan, apalagi jika mampu membuka lapangan kerja dengan karyawan di atas standar ketenaga kerjaan.

Sangat bertalian dengan *out put* dan *out come*, bahwa mutu memang menjadi harapan semua orang, tanpa terkecuali. Lembaga pendidikan Islam, sebagian masih dianggap belum mampu mengisi

ruang mutu secara keseluruhan. Sebenarnya tidak salah jika lulusan pondok pesantren, yang dalam undang-undang disebut sebagai salah satu bentuk pendidikan keagamaan, tidak mengisi ruang kerja profesional. Pendidikan keagamaan diselenggarakan dalam rangka melahirkan manusia yang ahli ilmu-ilmu keagamaan Islam. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, pendidikan Islam sudah tidak lagi memfokuskan pada ilmu-ilmu keagamaan *an sich*. Jika kita pernah mendengar persaingan ekonomi yang besar akan mengalahkan yang kecil, hari ini berbeda, yang cepat akan mengalahkan yang lambat.

Untuk memenuhi kebutuhan ruang mutu yang didukung profesionalitas, lembaga pendidikan Islam harus memacu secara cepat dan tepat. Bukan persoalan harapan saja, tetapi memang kenyataan empiris mutu pendidikan Islam. Dibutuhkan mental perubahan yang kuat dan siap, serta mampu mengelola kebijakan mutu yang dibentuk oleh Negara. Hal penting yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana manajemen perubahan melakukan peningkatan mutu pendidikan Islam.

¹ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 47.

PEMBAHASAN

Mental Perubahan

Penyelenggaraan pendidikan Islam, dalam berbagai bentuk kelembagaannya, sudah banyak mengalami kemajuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak membawa angin perubahan yang begitu kencang bagi proses penyelenggaraan pendidikan. Kata perubahan sudah menjadi “makanan” setiap orang, bahkan untuk meraih simpati publik, kata perubahan selalu mendominasi pemberitaan di berbagai media massa dan elektronik serta media sosial. Siapa pun yang berkeinginan maju harus mau dengan perubahan, yang tidak mau dengan perubahan maka akan tertinggal dan tergilas oleh angin perubahan itu sendiri.

Dalam terminologi sosiologi perubahan sosial dikatakan, tidak ada yang abadi dalam dunia ini, kecuali satu yaitu perubahan. Begitu pun dengan keberadaan pendidikan Islam, perubahan sudah menjadi satu tema pokok. Perubahan bukan sekedar sebuah kata yang mudah dan murah didengar, tapi perubahan merupakan perintah agama. Surah dan ayat Alqur'an yang paling populer dikalangan pengusung perubahan adalah ayat 11 surat al-Ra'du,

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا
أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ
[الرعد: ١١]

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Al-Ra'd: 11)

Dalam kontenks ayat di atas, banyak ilmuwan menyatakan bahwa melakukan perubahan dibutuhkan persiapan mental. Malik Madani, saat orasi ilmiah dalam acara wisuda di Institut Agama Islam Ibrahimy menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan

anfusihihim adalah mental. Jika sekedar merubah fisik barangkali tidak membutuhkan perencanaan dan strategi detail. Tetapi merubah mental seseorang agar mau dengan kenyataan perkembangan membutuhkan persiapan mental. Hal yang sama disampaikan Husein Aziz, Direktur Pascasarjana UINSA Surabaya, saat penulis menyampaikan disertasi pada ujian tertutup, bahwa mental merupakan kunci utama dalam mengikuti arus perubahan. Sulit rasanya umat Islam dengan segala proses penyelenggaraan pendidikannya untuk maju jika belum tersiapkan mental perubahan.

Andaikan Allah menggunakan hak prerogratifnya untuk menjadikan suatu kaum menjadi suatu kelompok masyarakat yang tidak baik (بِقَوْمٍ سُوءًا), tidak ada satu orang atau kelompok mana pun yang bisa melakukan penolakan. Tetapi, Allah justru akan merubah keadaan kebaikan suatu masyarakat yang berusaha dengan diiringi sikap mental yang bersahaja, melalui kebaikannya, maka Allah akan memenuhi kebaikan yang dilakukan hamba-Nya. Janganlah menyalahkan suatu keadaan, apalagi menyalahkan Allah jika ternyata keadaan suatu masyarakat lebih cenderung keburukannya. Semua terserah kita!

Ayat di atas bukan sekedar norma untuk memotivasi perilaku perubahan, tetapi instruksi Tuhan untuk umat manusia agar menyiapkan mental dalam mengikuti arus perubahan. Usaha yang gigih akan mendapatkan kesuksesan, namun sebaliknya jika usahanya tidak disertai dengan semangat mental perubahan yang gigih maka hanya teks perubahan yang terdengar dan terbaca, tanpa ada bekas perubahan menuju kebaikan. Kesungguhan itulah yang akan “dihargai” oleh Allah dengan pemberian anugerah diberinya jalan menuju sukses, mendapatkan petunjuk-Nya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat al-ankabut ayat 69, yaitu:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ [العنكبوت: ٦٩]

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Ankabut: 69)

Orang yang berbuat baiklah yang benar-benar akan dijadikan sebagai hamba yang selalu disertai dalam setiap usaha kesungguhannya. Hanya orang yang memiliki kebaikan mentallah yang akan mendapatkan anugerah kebersamaan dengan Allah dalam Kasih Sayang dan kelembutan sifat-Nya. Dalam ayat lain, kata *anfusihim* juga mengarah pada mental, sekalipun secara etimologis berarti jiwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
التَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحریم: ٦]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. Al-Tahrim: 6)

Kata *anfus* diterjemahkan dengan ‘dirimu’, karena jiwa memang berkaitan dengan keberadaan diri. Kita diperintah untuk selalu menjaga diri, menyiapkan mental keberagaman dengan penuh keimanan dan ketakwaan agar terbebas dari jeratan api neraka. Jiwa, diri, dan mental adalah sesuatu yang halus, yang membutuhkan sentuhan bathiniyah. Terhindar dari api neraka bukan saja kelak setelah kematian, namun kehidupan dunia yang akan mengantarkan ke alam akhirat membutuhkan mental yang bersih, jiwa yang lembut penuh cahaya keimanan dan ketakwaan. Cermin kehidupan jiwa atau mental yang halus adalah ketika melakukan interaksi sosial di tengah kehidupan yang penuh tantangan, godaan, dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Agar diri ini, keluarga, dan kerabat terhindar dari api neraka perlu bimbingan dan petunjuk akan sebuah kebenaran ilahi. Meneladani Nabi dalam seluruh dimensi kehidupan merupakan wujud dari usaha untuk terhindar dari sesuatu yang buruk. Jadi, mental memang membutuhkan sentuhan, bimbingan,

dan arahan agar siap melakukan perubahan perilaku supaya menemukan kedamaian hidup.

Menuju tujuan mulia, perubahan ke arah yang lebih baik merupakan persiapan untuk mendapatkan sesuatu yang bermutu. Penyelenggaraan pendidikan adalah pranata sosial, wadah atau lembaga sosial yang menjadi tempat mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi perkembangan dunia. Umat Islam di Indonesia menjadi penduduk yang mayoritas. Karena itu, maju dan mundurnya bangsa Indonesia akan tercermin dalam pola pikir dan perilaku umat Islam. Di masa lalu, masa kelam umat Islam (khususnya kaum nahdliyin, NU), pendidikan Islam belum menjadi pendidikan alternatif. Lulusan pendidikan Islam masih dianggap sebagai penyedia sumber daya manusia yang hanya menguasai ilmu keagamaan Islam. Kalimat dan ungkapan nyinyir yang diarahkan kepada pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren, begitu keras dan derap lajunya.

Kesan lembaga pendidikan pinggiran, tak menghasilkan lulusan yang siap bersaing dalam seluruh aspek kehidupan akibat pengaruh globalisasi terdengar nyaring di ruang-ruang terbuka. Ada yang menanggapi dengan santai, karena memang ditanamkan sikap menerima apa adanya. Ada yang biasa-biasa saja, bahkan terkesan cuek dengan segala ungkapan nyinyir. Sebagian ada yang marah dan tersinggung dengan cap pinggiran dan jumud, tidak mau dengan perubahan. Ragam sikap umat Islam dan pengelola atau pemimpin lembaga pendidikan Islam terhadap kritik tajam ternyata menjadi pemicu dikalangan pemimpin pondok pesantren.

Sebagian lembaga pendidikan Islam yang memang sejak awal menerapkan manajemen modern, selalu adaptasi dengan perubahan, menjadi pilihan idola masyarakat. Di Jakarta ada pendidikan Islam al-Azhar. Mereka yang sekolah di al-Azhar kebanyakan orang-orang yang secara ekonomi mapan, kelas menengah atas. Namun, lembaga pendidikan Islam pondok pesantren masih dianggap sebagai pendidikan yang hanya mengeluarkan out put orang-orang yang hanya bisa mengaji kitab-kitab klasik, karya ulama-ulama terdahulu. Manajemen pondok pesantren belum sepenuhnya menerapkan modernisasi, penyelenggaraan pendidikan masih belum seluruhnya menerima perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

² Husein Aziz, “Kebijakan SMK Mini Jawa Timur di Iingkungan Pondok Pesantren: Analisis Perda Jawa Timur Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Kuliah Penulisan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel-Surabaya).

Setelah banyak belajar dari ‘kegagalan’ masa lalu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam, para pemimpin pondok pesantren segera bangkit dan melakukan akselerasi terhadap perubahan. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia menjadi keniscayaan yang harus dihadapi dan dilakukan secara terencana, terarah, intensif, dan berkesinambungan oleh umat Islam.³ Sebagaimana perintah perubahan yang tercermin dalam ayat di atas, jangan hanya dipidatoka saja. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan memiliki peran penting dan strategis.

Kesadaran dan hilangnya dikotomi keilmuan dikalangan cendekiawan muslim, khususnya pemimpin pondok pesantren, antara ilmu agama dan umum sudah mencair dan lunak. Ilmu sudah terintegrasi dalam sebuah kewajiban mencarinya. Apa pun keahliannya, umat Islam sangat membutuhkan. Imam al-Ghazali dalam karya monumentalnya, *Ihya' 'Ulumuddin* menyatakan bahwa kewajiban mencari ilmu bagi orang Islam adalah kewajiban kolektif dalam berbagai bidang keahlian. Bekal keilmuan menjadi modal penting dalam memompa sikap dan mental perubahan umat Islam. Di era sekarang, tantangan yang harus dihadapi oleh pendidikan Islam bukan saja pertarungan ideologi besar dunia, globalisasi industri sebagai dampak kemajuan teknologi. Pendidikan Islam juga menghadapi berbagai kecenderungan, bahkan ‘kegilaan’ liberalisasi di semua lini kehidupan, bak badai besar (*turbulance*) seperti tsunami.

Setidaknya, menurut Daniel Bell sebagaimana tulis Abuddin Nata,⁴ ada lima kecenderungan arus globalisasi, yaitu:

1. adanya integrasi ekonomi yang mengakibatkan dunia pendidikan menghadapi persaingan bebas dalam perekonomian. Akibat kecenderungan ini ada sebagian kalangan umat Islam menerapkan kapitalisasi pendidikan.
2. fragmentasi politik yang membuka ruang tuntutan terhadap praktik politik yang egaliter, demokratis, transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan profesional.
3. penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih, menuntut adanya keterbukaan dan pelayanan cepat dan tepat waktu. Semua berbasis on line, tidak ada lagi kertas berjejeran di meja yang harus dikoreksi satu persatu. Jika masih ada kertas pun hanya berlaku pada pelayanan administrasi pokok saja.
4. interdependensi antar negara yang menyebabkan adanya hegemoni negara-negara besar dan maju terhadap negara yang belum maju atau berkembang. Terbentuknya hubungan saling ketergantungan bisa mengakibatkan beban negara menjadi besar yang mengakibatkan layanan pendidikan harus tergantung juga. Bantuan negara maju kepada negara berkembang kadang menembus hegemoni politik dan ekonomi yang akibatnya interdependensi berubah menjadi intervensi.
5. adanya penjajahan gaya baru melalui akulturasi, penjajahan budaya yang mengakibatkan pola pikir (*mindset*) pengguna jasa layanan penyelenggaraan pendidikan menjadi ‘sekuler’. Belajar, mencari ilmu bukan untuk memperbaiki perilaku kebaikan. Pragmatisme melanda dunia pendidikan, akibatnya belajar menjadi sarana ampuh untuk mencari pekerjaan. Mau tidak mau penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan kemauan pasar dunia kerja dan industri.

Kecenderungan arus globalisasi yang kelima menjadi pusat perhatian kalangan penyelenggara pendidikan Islam. Sejak memasuki abad ke-21 atau abad millenial, yang kemudian dikenal dengan era ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan umat Islam semakin tertantang, khususnya kelompok umat yang selama ini disebut sebagai kelompok tradisional. Suatu komunitas masyarakat yang selalu mempertahankan tradisi dan asyik dengan romantisme sejarah. Masa lalu seakan menjadi masa yang seharusnya dipertahankan tanpa ada perubahan apa pun. Bahkan modifikasi pun menjadi momok bagi masyarakat tradisional. Padahal tanpa adanya dorongan atau *support* iptek yang mapan masyarakat akan tertinggal dari perubahan.

Akibat pesatnya iptek yang masuk ke semua lini kehidupan, terjadi perdebatan antar ilmu dan etika (agama) dalam konteks bebas nilai. Jika di Barat ilmu pengetahuan dan teknologi masuk dalam

³ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), 2.

⁴ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 14-17.

bingkai dikotomi, artinya berkembangnya iptek harus terbebas dari etika yang diatur dengan norma agama. Proses pembebasan nilai dalam kebudayaan Barat oleh pakar pendidikan Islam dikatakan sebagai sekulerisasi ilmu pengetahuan. Dulu, pada masa *aufklarung* atau pencerahan di Barat, kelompok pengusung perubahan menyatakan bahwa kalau mau maju harus melepaskan ilmu pengetahuan dari etika dan dogma-dogma agama. Bagi mereka agama adalah candu dalam proses sekulerisasi ilmu. Dalam konteks Indonesia, ilmu tidak boleh lepas dari nilai-nilai agama dan etika yang berkembang di tengah masyarakat. Tujuan pendidikan nasional menempatkan pembentukan keimanan dan ketakwaan yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sasaran utama.⁵

Ilmu harus obyektif, karena itu harus dipisahkan dengan iman agar terbebas dari belenggu nilai-nilai agama. Kecenderungan sekulerisasi ilmu di Barat hingga memisahkan ilmu dengan iman terjadi karena dominasi gereja-gereja dalam mengintervensi dan menghegemoni para ilmuwan. Gereja punya otoritas menentukan kebenaran sebuah ilmu. Ketika seseorang melakukan kegiatan ilmiah, maka ia harus bebas dari kepentingan apa pun yang menggoda nilai kebenaran ilmiahnya, termasuk agama pun tidak boleh mempengaruhi proses ilmiah karena akan terjadi bias obyektivitas terhadap hasil penyelidikan keilmuannya. Tidak mudah untuk mengintegrasikan ilmu dan agama (sebagai etika dan rambu-rambu moral) dalam satu bingkai yang *integrated*.⁶ Mengilmukan Islam atau mengislamkan ilmu, dalam kalimat lain diungkap sebagai proses islamisasi ilmu

Tradisionalisme yang masih melekat dalam pola kehidupandi era globalisasi, dikatakan sebagai reaksi atas perkembangan sosial yang begitu cepat, namun di sisi lain tidak mampu untuk mengadaptasikan diri. Sebagai 'balasannya' adalah mempertahankan tradisi masa lalu, untuk dijadikan tameng, dibangkitkan kembali sekedar untuk mencari kebenaran atas kekalahan dalam bersaing mengikuti pesatnya globalisasi akibat iptek yang semakin canggih. Apa yang datang dari luar dianggap sebagai perusak

tradisi. Lebih baik berromantisme dengan sejarah yang telah mendarah daging.⁷

Kelompok romantis ini bisa saja melakukan penolakan karena ingin mempertahankan kekuasaan budayanya. Padahal di tempat 'tersembunyi' memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai kegiatan *seilent* agar tidak diketahui pengikut budayanya. Pemikiran kelompok anti teknologi bukan saja didominasi elit yang ada di pinggiran. Mereka tidak semata-mata terinjeksi virus pemikiran filsuf dalam negeri. Atas nama berpikir filsafati, mereka ingin kembali ke akar, alam, dan filsafat timur. Latar belakang pemikiran kelompok anti teknologi ini didasari atas gejala kapitalisme destruktif dan nilai-nilai perjuangan humanis yang mereka usung. Tidak banyak memang untuk mengidentifikasi kelompok romantis dan anti teknologi. Karena pada hakikatnya mereka juga sadar dengan gerak natural perubahan. Tidak direncanakan dan tidak dipikirkan pun, perubahan pasti berjalan.

Realita di atas menjadi motivasi bagi penyelenggara dan pengelola pendidikan Islam dalam memacu perubahan menuju pendidikan yang bermutu. Siap bersaing, *fastabiquu al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan) dalam mengelola pendidikan dengan manajemen yang berkualitas. Modal manajemen merupakan kewajiban bagi penanggung jawab penyelenggara pendidikan. Keberadaan yayasan pendidikan dan layanan sosial menjadi penting dalam kesiapan manajemen menuju mutu pendidikan Islam.

Masyarakat akan melihat sejauhmana lulusan pendidikan Islam mampu bersaing dengan dunia pendidikan lain. Sudah banyak alumni atau lulusan pendidikan Islam masuk ke jenjang pendidikan tinggi yang maju. Sudah banyak santri pondok pesantren yang melanjutkan studi pada perguruan tinggi yang kredibel. Banyak pula lulusan pondok pesantren yang melebihi lulusan pendidikan umum dalam hal produktifitas kerja. Para santri sudah memasuki ruang persaingan ketat dalam dunia global. Mental perubahan sebagai pintu menuju pendidikan mutu merupakan keharusan yang tak terelakkan.

⁵ H.A.R. Tilaar, *Pernabahan Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 59-60.

⁶ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial* (Jakarta: Kecana, 2010), 2-3.

⁷ Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan: dari Tradisional, (neo) Liberal, Marxis-Sosialis, hingga Postmodern* (Yogyakarta: Arruzz Media, 2015), 111.

Mutu Pendidikan sebagai Kebutuhan atau Keinginan

Istilah mutu sering dikaitkan dengan sebuah hasil dari upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok. Masyarakat akan mengatakan lembaga pendidikan bermutu jika menghasilkan lulusan atau alumninya sebagai manusia yang sukses dalam meniti kehidupan. Sebaliknya, masyarakat akan menjustifikasi lembaga pendidikan sebagai tidak bermutu manakala lulusannya belum menunjukkan kinerja yang baik dan produktif. Dalam konteks lulusan lembaga pendidikan, parameter sebagai lembaga pendidikan bermutu tentu tidak cukup hanya satu indikator. Misalnya, seorang peserta didik telah menyelesaikan studi di lembaga pendidikan, lalu dia melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas, lalu ke perguruan tinggi. Sebagian masyarakat ada yang menilai, sekolah atau lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika banyak lulusannya melanjutkan ke perguruan tinggi favorit. Sementara kelompok masyarakat lain mengatakan, lembaga pendidikan bermutu jika lulusannya menjadi manusia yang baik, menjadi tauladan bagi kehidupan masyarakat dan selalu memfasilitasi penyelesaian problem kemasyarakatan.

Asumsi atau persepsi publik terhadap mutu bagi lembaga pendidikan, sebagaimana dijelaskan di atas tentu tidak berdiri sendiri. Persepsi itu terbangun atau dibangun atas banyak faktor, perkembangan media informasi yang begitu deras dan cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pergaulan dengan banyak kelompok masyarakat, dan sajian diskusi atau berita yang berkembang di media massa, elektronik serta sosial. Dewasa ini mutu menjadi trend pembicaraan masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak penting biaya mahal jika hasilnya menambah kepuasan dan kebaikan.

Sebagai contoh, merebaknya toka-toko modern yang berjejer hampir di sepanjang jalan raya telah menjadi alternatif bagi masyarakat yang hendak memenuhi kebutuhan sesaat untuk memenuhi kepuasan. Padahal jika dibandingkan dengan harga di toko tradisional yang dikelola masyarakat umum, selisihnya cukup lumayan tinggi. Namun mutu pe-

layanan dan kenyamanan konsumen terpenuhi saat baru memasuki toko modern.

Mutu telah menjadi isu yang sangat penting bagi seluruh sektor kehidupan, baik di kalangan bisnis, pemerintahan, sistem pendidikan, dan sektor-sektor lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, mutu diartikan sebagai ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya), kualitas.⁸ Menurut kamus bahasa Arab, mutu diterjemahkan dalam lafadh جودي (*judiyun*).⁹

Dalam bahasa Inggris, disebutkan dengan *quality*, dan menjadi bahasa Indonesia dengan kualitas. Kata terakhir ini juga sering menjadi perbincangan banyak kalangan masyarakat tanpa mengenal kelas sosial dan keilmuan. Semua orang tahu tentang apa itu kualitas dan mutu, tapi tidak semuanya memahami dengan detail ketika ditanya standard dan kualifikasi mutu dan kualitas. Masyarakat umum hanya bisa merasakan hasil dan efek dari sebuah upaya yang menghasilkan kerja bermutu dan berkualitas.

Siapa bilang Alqur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat Islam dan umat manusia tidak mengenal ajaran tentang mutu. Allah menyuruh kepada kita semua agar memperhatikan keadilan dan kebajikan. Dua hal tersebut menjadi prasyarat agar bisa menapaki jalan kehidupan yang bermutu, baik untuk dirinya maupun orang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
[النحل: ٩٠]

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. Al-Nahl: 90)

⁸ Tim penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 677.

⁹ Ahmad Warson Munawir dan Muhammad Fairuz, *Al Munawwir, Kamus Indonesia - Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 594

Dalam penjelasannya, Quraish Shibah, mengutip kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud mengatakan, bahwa ayat di atas adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan di dalam Alquran. Tidak mudah melakukan perbuatan kebaikan dan menegakkan keadilan karena butuh proses dan persiapan yang matang. Bila hanya menyeru tanpa beban, setiap orang sangat mungkin bisa melakukan. Tapi jika kebaikan dan keadilan yang akan kita lakukan membekas dalam diri dan jiwa maka tidak semudah mengatakan kebaikan dan keadilan.

Umat Islam oleh Allah dinyatakan sebagai umat yang terbaik, dengan syarat mampu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar yang disertai dengan mutu perbuatannya. Umat terbaik diantara umat yang lain bukanlah sekedar slogan dan motto yang hanya dibaca dan didengungkan sebagai kesombongan diri di atas umat lainnya. Sebagai umat terbaik, umat yang terpilih, Allah berfirman dalam surat Ali Imron ayat 110, sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ [آل عمران: 110]

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (QS. Ali 'Imran: 110)

Membentuk dan mempertahankan umat terbaik dibutuhkan proses yang berkelanjutan. Tidak hanya menggunakan parameter teks, namun kontekstual dengan dinamika yang sedang terjadi akibat kemajuan teknologi yang terus meningkat. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan keagamaan mengharuskan adanya kesiapan dan kemauan untuk melakukan perubahan. Yang tidak mau dengan dinamika perubahan akan tergilas dan tertinggal. Harus ada inovasi-inovasi dan kreasi dalam mengadopsi seluruh proses perubahan agar tetap survive

di tengah tantangan arus globalisasi.¹⁰ Menghasilkan lulusan yang berproses dalam lembaga pendidikan Islam agar menjadi lulusan yang bermutu adalah kebutuhan. Untuk itu perlu ada komitmen melakukan program pendidikan yang bermutu.

Nana Syaodih Sukmadinata, sebagaimana tulis Fathurrohman, mengidentifikasi basic yang harus dipersiapkan dalam rangka menjadikan mutu dalam sebuah proses pendidikan, yaitu 1) perlunya komitmen melakukan perubahan yang diterapkan dalam pola kepemimpinan, 2) kejelasan terhadap pemahaman sebuah kondisi real, 3) memiliki visi yang jelas untuk menatap masa depan yang penuh tantangan. Karena kunci utama menjadikan pendidikan bermutu adalah komitmen melakukan perubahan sebagai pintu masuk sebuah inovasi.¹¹

Pondok pesantren sebagai salah satu, bahkan yang terdepan sebagai lembaga pendidikan Islam sudah banyak melakukan proses inovasi. Sebagai pendidikan tradisional, pesantren sudah mereformasi diri dengan melakukan adopsi pembelajaran modern, dan realita ini sudah banyak kita saksikan. Para aktivis Islam telah mengembangkan pendidikan pesantren dengan membentuk visi yang sangat jelas dan ideologis. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya membendung arus kapitalisasi global yang sudah melanda berbagai lini institusi sosial, termasuk pendidikan yang ada di pesantren.¹²

Sempat dicap sebagai pendidikan yang melahirkan teroris sehingga dicurigai oleh lembaga-lembaga intelejen, luar negeri dan dalam negeri sebagai sarang pemberontak. Sebagian besar para pengelola pesantren, terutama kiai-kiai pesantren berbasis NU tidak terima dan bahkan mencurigai balik kelompok atau bahkan badan intelejen yang menuduhnya sarang teroris sebagai agen asing. Jika memang benar ada sebagian kecil pesantren mendidik santrinya menjadi generasi yang keras dalam merespon globalisasi sehingga melahirkan teroris, maka tidak boleh melakukan generalisasi stigma buruk semacam itu.

¹⁰ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, 300.

¹¹ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, 364.

¹² Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan: dari Tradisional, (neo) Liberal, Marxis-Sosialis, hingga Postmodern*, 222.

Untuk memenuhi kebutuhan akan mutu pendidikan, salah satu prasyaratnya adalah kualitas sumber daya yang memadai. Kualitas menurut Iyung Pahan, sebagaimana tulis Barnawi dan M. Arifin adalah keseluruhan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa sehingga memberikan efek memuaskan dengan dukungan kemampuan yang dimilikinya.¹³ Sementara dalam konteks lain, kualitas yang sepadan dengan mutu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Sebenarnya, istilah kualitas lebih sering digunakan dalam dunia bisnis, rekayasa, dan manufaktur. Produk yang berupa barang atau jasa akan dikatakan berkualitas manakala penggunaannya merasakan sebuah kepuasan. Begitu juga dalam penyelenggaraan pendidikan. Mutu atau kualitas pendidikan akan dirasakan oleh masyarakat manakala kepuasan telah menjadi persepsi masyarakat.

Kita sering menyaksikan beberapa Negara sebagai rujukan dalam hal pengembangan mutu pendidikan. Salah Negara yang patut kita jadikan sebagai Negara yang memiliki komitmen mutu adalah Jepang. Budaya disiplin, menghargai waktu dan kompetensi menjadi tontonan yang sekaligus menjadi tuntutan dari berbagai Negara. Di media social, melalui youtube banyak kita saksikan orang Jepang menundukkan kepala dan badannya di tengah jalan sebagai isyarat memberikan kehormatan dan ucapan terima kasih kepada orang lain.

Untuk itu di Jepang dikenal dengan istilah *Kaizen* sebagai budaya mutu. Secara etimologi *kaizen* berasal dari *kai* yang berarti perubahan, dan *zen* berarti baik. Perubahan menuju kebaikan adalah komitmen bersama yang telah membudaya di Jepang. Falsafah *kaizen* mendorong semua orang untuk bekerja dengan cara yang baik, bergaul di tengah kehidupan social dengan baik, rumah tangga yang ideal, dan lain sebagainya, itu semua harus terus disempurnakan setiap saat. Sehingga secara berkesinambungan cara kerja yang baik selalau mengikuti dinamika perkembangan.¹⁴

Dalam konteks mutu pendidikan, se-

bagaimana dijelaskan di atas harus menjadi komitmen umat Islam yang sedang menyelenggarakan pendidikan. Stigma buruk sebagian masyarakat terhadap pendidikan yang dikelola umat Islam semakin hari semakin menghilang. Hilangnya stigma buruk karena pendidikan Islam telah dikelola dengan komitmen mutu yang tinggi, bahkan menjalar sebagai budaya kerja. Ada rasa malu dikalangan pengelola pendidikan Islam, apa pun bentuknya, manakala tidak memperhatikan mutu. Kepuasan pengguna jasa layanan pendidikan menjadi motivasi sekaligus niat kolektif. Bukan sekedar keinginan, tetapi kebutuhan akan mutu pendidikan Islam menjadi keharusan yang tak terelakkan.

Kebijakan Mutu Pendidikan: Upaya Mendorong Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu

Sejak reformasi bergulir, salah satunya melahrikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pembaruan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Tidak ada lagi, alias dihapusnya diskriminasi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. Begitu pula dengan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum, reformasi telah membuka pintu seluas-luasnya bagi pemenuhan hak asasi manusia melalui jalur pendidikan.¹⁵ Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan sudah terbuka lebar bagi siapa pun untuk ikut berpartisipasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kebijakan strategis tersebut menuntut para penyelenggara pendidikan dan masyarakat pendidikan untuk berusaha keras dalam proses pengembangan pendidikannya. Perkembangan zaman, dengan rekayasa teknologi informasi yang serba digital mengharuskan adanya inovasi dan kreasi. Bila masa lalu ada idiom yang besar akan mengalahkan yang kecil, hari ini sudah berubah, yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Kerja keras kita bukan jalan di tempat, tapi harus benar-benar berjalan seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibutuhkan kemauan berubah dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan yang ada. Untuk itulah, kita membutuhkan proses pengembangan pendidikan yang benar-benar bermutu.

¹³ Barnawi dan M. Arifin, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Arruzz Media, 2017), 15.

¹⁴ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, 49.

¹⁵ Baca penjelasan umum UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengapa kita harus mengembangkan pendidikan agar menjadi bermutu? Pertanyaan singkat yang menggelitik di telinga kita, seakan kita ditantang dengan berbagai sikap mutu atau kualitas. Itu dilakukan agar secara berkelanjutan menjadikan mutu sebagai motto penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pertanyaan tersebut juga mengandung makna, bahwa mutu pendidikan merupakan sarana sekaligus tujuan pendidikan. Sebagai sarana, karena mutu pendidikan berbanding lurus dengan tujuan pendidikan nasional maupun tujuan sekolah dan atau tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan akan terwujud jika para pengelola dan penyelenggara pendidikan, dan seluruh komponen pendidikan menjadikan mutu sebagai budaya. Tanpa ada paksaan dan perintah yang bersumber dari berbagai aturan, mutu berjalan secara alamiah dalam lingkungan penyelenggaraan pendidikan.

Budaya mutu dalam pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab para pengelola pendidikan di sekolah maupun kampus. Berhasil tidaknya pendidikan akan tercermin dari upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan sekolah. Secara berantai, ketiga pilar utama tanggungjawab pendidikan berjalan saling melengkapi.¹⁶ Perangkat atau instrumen kebijakan terhadap pilar pendidikan tersebut sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat (2), yakni masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Selanjutnya, disebutkan dalam pasal 56 ayat (1), yaitu masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. Semakin jelas, bahwa masyarakat begitu strategi dalam peningkatan pelayanan mutu pendidikan.

Untuk mencapai tujuan mutu pendidikan, perencanaan menjadi faktor yang ikut menentukan keberhasilan. Tanpa ada perencanaan yang matang, rasanya sulit sebuah tujuan akan tercapai, bahkan bisa

nihil dalam pencapaian tujuan. Untuk itu, prosesnya dimulai dari bagaimana melakukan perencanaan. Begitu pun sebaliknya, menentukan tujuan juga menjadi hal penting dalam menyusun sebuah perencanaan, karena di dalam perencanaan tercantum kemana tujuan hendak berlabuh.

Sebagai sebuah ilustrasi, manusia membutuhkan makanan bukan hanya sekedar untuk menutupi rasa lapar. Ia membutuhkan makanan karena harus tampil prima dalam kehidupan masyarakat. Bila makanan tidak cukup, dan kesehatan berkurang akibat tidak memperhatikan makanan, maka ia akan “tertinggal” dalam proses interaksi sosial. Semakin tinggi tujuan yang hendak diraih, semaik abstrak tujuan itu sendiri.¹⁷

Semua upaya yang dilakukan dalam proses tujuan mutu pendidikan sesungguhnya beriringan dengan harapan tercapainya tujuan nasional. Disebutkan dalam pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sebagai langkah kongritnya, system pendidikan nasional juga mengharuskan adanya lembaga penjaminan mutu di setiap satuan pendidikan.

Lembaga ini, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) memiliki tugas membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Perintah penjaminan mutu dalam setiap satuan pendidikan merupakan keharusan dan kewajiban agar dapat mencapai, bahkan melebihi standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan.

Problemnya, apakah setiap satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, siap memenuhi apa yang menjadi kewajiban proses penjaminan mutu? Kita tahu,

¹⁶ Suparlan Suhartono, *Wawasan Pendidikan* (Jogjakarta: Arruzz Media Group, 2008), 51.

¹⁷ Barnawi dan M. Arifin, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Teori dan Praktik*, 83.

bahwa SNP yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang ada adalah dalam rangka memenuhi standar minimal untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Di beberapa Daerah (maksudnya Daerah Kabupaten/Kota), SNP sangat sulit dipenuhi, terutama pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak didukung perangkat yang memadai.

Dalam kesempatan penulis berdiskusi dengan Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Dr. Fathorahman, disampaikan bahwa realita penyelenggaraan pendidikan banyak yang belum mampu memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh pemerintah. Apalagi jika merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah,¹⁸ kita akan banyak menerapkan kebijakan dengan kebijaksanaan, alias ada kelonggaran dalam implementasi. Sehingga, saya (menurut Fathorahman), harus arif dalam melihat kearifan local yang berkembang. Namun, harus ada komitmen bersama agar ke depan satuan pendidikan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal harus berupaya sungguh-sungguh. Jika tidak, maka jangan salahkan Pemerintah Kabupaten melakukan penghentian ijin operasional.

Apa yang dilakukan Pemerintah dengan kebijakan mutu pendidikannya, sesungguhnya untuk memenuhi apa yang menjadi cita-cita bersama, yaitu terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Islam, dalam hal ini pondok pesantren harus siap secara mandiri melakukan usaha penjaminan mutu. Sebagai pendidikan indigenos, yang keberlangsungannya cukup lama, jauh sebelum Indonesia memiliki sistem pendidikan, pesantren sudah berjalan dalam kemandirian. Dan, sebagai konsekuensi bagian dari sistem pendidikan nasional, yang disebutnya sebagai pendidikan keagamaan,¹⁹ pesantren harus istikomah mempertahankan kemandiriannya. Namun demikian, segala implikasi percepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pesantren harus adaptif, sehingga keberadaannya tetap menjadi alternatif utama bagi masyarakat.

¹⁸Sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah.

¹⁹Lihat pasal 30 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Manajemen Perubahan sebagai Strategi Mutu Pendidikan Islam

Mengoperasikan mutu pendidikan dibutuhkan seperangkat persiapan, agar persoalan mutu bukan hanya sekedar moto. Langkah kongritnya adalah kesiapan untuk melakukan perubahan secara “revolusioner” dengan menerapkan manajemen penyelenggaraan pendidikan yang baik dan benar. Sebagaimana penulis jelaskan di awal tulisan ini, bahwa mental perubahan menjadi modal spirit penting dalam menunjukkan konsistensi terhadap angin perubahan yang begitu kencang. Jangan terlalu romantis dengan masa keemasan masa lalu, namun romantisme masa lalu menjadi pemicu untuk mempertahankan keemasan pada masanya.

Kita kadang sering hanyut dalam romantisme sejarah sehingga memunculkan sikap apatis terhadap segala perubahan. Tidak perlu dipungkiri, bahwa terbentuknya sejarah kehidupan sosial setiap fase, selalu terjadi karena ada proses social sebelumnya. Apa yang diwariskan kepada kita, substansi dan isinya, melalui proses sejarah merupakan warisan sosial. Apa pun yang terjadi dalam masyarakat kini perlu menjadi cermin akumulasi keseluruhan produk dari sejarah awal kehidupan manusia.²⁰

Menatap masa depan dengan melihat ke belakang agar kita tidak kehilangan jati diri, apalagi menyangkut keberlangsungan pendidikan Islam. Dalam konteks masa Yunani Kuno, pendidikan diselenggarakan untuk menampung gagasan dan pemikiran para filsuf.²¹ Sehingga hampir setiap pembahasan filsafat, semua ilmuwan selalu merujuk pada gagasan yang sudah terbangun pada masa Yunani Kuno. Begitu pun dengan proses pendidikan Islam, rujukannya selalu mengaitkan pada masa Rasulullah SAW maupun masa-masa kekhalifahan.

Setiap fase, atau periodisasi sejarah kehidupan sosial, perubahan selalu menjadi gagasan yang menyertainya. Siapa yang tidak mau dengan perubahan, sama saja dengan melawan sunah Allah. Memang, setiap masa atau fase selalu berjalan dalam koridor kejayaan dan kemunduran. Jika mengalami kegagalan, maka ada masa depan yang akan menentukan keberhasilan. Sebagaimana firman Allah, yaitu:

²⁰Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, cet. Keenam, 2011), 69.

²¹Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 21.

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ مِثْلُهُ وَتِلْكَ
الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ
مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [آل عمران: ١٤٠]

Artinya: "Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." (QS. Ali 'Imran: 140)

Kita meyakini, bahwa Allah yang akan mengatur silih bergantinya kejayaan dan kemunduran, sebagaimana kisah perang uhud dan perang badar. Namun, harapan untuk memperoleh kejayaan bukan dilakukan dengan cara meditasi, berkontemplasi dalam sebuah "penyendirian" tanpa melihat fenomena yang terjadi pada masa yang sedang berlangsung (masa kini dan masa yang akan datang). Kita akan meninggalkan dosa warisan mana kala mewariskan tradisi kehidupan yang tidak baik bagi generasi penerusnya. Diperlukan terobosan dengan manajemen perubahan yang strategis, atau strategi dalam mengelola perubahan.

Pesantren, dengan sistem 'kerajaannya', bukan tidak mungkin melakukan percepatan perubahan melalui manajemen yang baik. Peran kiai, sebagai sentral kekuasaan memegang peran yang sangat menentukan dalam menangkap gejala percepatan perkembangan zaman. Sama seperti lembaga pendidikan pada umumnya, pesantren sebagai institusi pendidikan juga tidak akan bisa mengelak dari arus perubahan. Ini membutuhkan kerja keras, kreatif, inovatif, dan progressif dari kiai sebagai figur sentral.²²

Seiring dinamika yang berkembang saat ini, berbagai perubahan kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam proses penyelenggaraan pendidikan, juga menuntut pesantren, secara kelembagaan melakukan adaptasi. Pemerintah sudah tidak lagi

membedakan mana pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, dan mana yang diselenggarakan oleh masyarakat. Semua punya peran sama dalam kontribusi bagi pencapaian proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam manajemen biasa dikenal dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Agar tidak sekedar melakukan perencanaan, maka diperlukan sistem perencanaan yang baik melalui pedoman yang benar dan diikuti secara konsisten.

Perlunya menghadirkan manajemen, karena manajemen, sebagaimana yang sering kita kenal memiliki fungsi sebagai *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Keempat fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang satu sama lain saling berkaitan. Mengapa merencanakan saja butuh sistem? Salah dalam menyusun dan membentuk perencanaan bisa berakibat pada pelaksanaan yang salah juga. Sebelum menyusun rencana, langkah awal yang harus dilakukan oleh pengelola pendidikan Islam adalah niat, motivasi pertama yang menginspirasi langkah-langkah selanjutnya. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang sangat familier di telinga kita, yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى

Artinya: "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan."

Setelah niat sudah benar, sebagaimana fungsi manajemen yang pertama adalah melakukan perencanaan. Dalam proses perencanaan (*planning*) sangat ditekankan melihat masa depan panjang, di mana akan ada suasana yang berbeda dari masa yang sedang kita jalani. Untuk itu, selain niat menjadi anjuran dan motivasi dalam setiap langkah, orientasi masa depan juga memerlukan konsistensi. Dalam konteks melihat masa akan datang yang panjang, Allah telah menggariskan dalam Alqur'an surat al-Hasyr, ayat 18, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَآتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [الحشر: ١٨]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari

²²Nur Efendi, *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren* (Yogyakarta: Teras, 2014), 167.

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)

Hari esok adalah masa yang akan kita lewati, untuk itu harus benar-benar diperhatikan. Kesuksesan perjalanan masa yang akan kita lewati, sangat mungkin tergantung dari persiapan hari ini. Maka perencanaan menjadi pintu masuk untuk melangkah masa yang akan datang, sekalipun apa yang kita rencanakan kadang tidak berbanding lurus dengan kenyataan empiris. Orang yang beriman dan bertakwa pasti akan mengembalikan pada kalimat, kita yang merencanakan, Tuhan lah yang menentukan.

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, perencanaan sangat memegang peran penting dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan. Lembaga pendidikan umum, terutama yang diselenggarakan oleh kalangan non muslim bermutu dan minati banyak kalangan kelas ekonomi atas karena direncanakan dengan matang. Mereka benar-benar mempersiapkan sedari awal terhadap kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Biaya mahal tidak menjadi persoalan jika mutu keluarannya menjanjikan bagi masa depan anak-anaknya.

Merencanakan bukan hanya soal waktu, jangka pendek, menengah dan panjang, sebagaimana berlaku juga dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara. Islam mengajarkan perencanaan justru tidak tergantung dengan waktu, yaitu perencanaan untuk tujuan waktu yang abadi, kehidupan akhirat yang kekal. Kehidupan akhirat harus diniatkan dan diusahakan secara sungguh-sungguh dengan berbagai amal saleh, kebaikan kepada sesame dan lingkungan.

Begitu pentingnya masa abadi tersebut, umat Islam di dunia harus menjalaninya secara benar dan baik. Agar kehidupan abadi berkualitas atau bermutu, maka proses kehidupan dunia harus dijalani dengan kebenaran normatif dan substantif. Ada norma kehidupan yang harus dilaksanakan, sebagaimana perintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berjalan beriringan dengan norma, ada nilai-nilai kehidupan, termasuk dalam proses penyelenggaraan pendidikan, yaitu substansi penyelenggaraan pendidikan.

Pengorganisasian dalam pelaksanaan fungsi manajemen memiliki peran setelah perencanaan dinyatakan selesai. Dan begitu seterusnya pada tahap pelaksanaan (*actuating*) juga lebih urgen lagi. Proses pengorganisasian dan pelaksanaan bergantung pada distribusi sumber daya manusia dan sumber lainnya. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan dan tugas yang telah diberikan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses pelaksanaan. Kita tidak boleh sekedar menyusun rencana tetapi tidak mampu melaksanakan. Tipe manusia yang hanya berencana tetapi tidak mengaplikasikan rencana tersebut, dianggap hanya sekedar berbicara tanpa fakta. Allah sangat tidak menyukai, bahkan membenci manusia yang hanya berbicara tanpa fakta, sebagaimana ditegaskan dalam Alqur'an, yaitu:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [الصف: 3]

Artinya: “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. Al-Shaff: 3)

Jika nilai-nilai ajaran Islam yang kita anut memerintahkan betapa pentingnya perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan, tidak seharusnya penyelenggaraan pendidikan dilakukan apa adanya. Semua harus berbenah menuju perubahan yang dikelola dengan baik dan benar. Andai saja pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dikelola dengan manajemen modern yang didukung dengan tenaga professional dan skill yang memadai, nampaknya akan menjadi pilihan utama bagi kalangan menengah atas. Akan berkembang pesat menyaingi lembaga pendidikan umum lainnya. Kita patut berbangga hati karena sudah banyak pesantren yang menerapkan manajemen berbasis professional dan skill yang terintegrasi.

Sebagai profesi, manajemen dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang yang memimpin sebuah unit organisasi. Kerja professional akan melahirkan produk yang berkualitas dan bermutu. Untuk kebutuhan professional tersebut, seorang yang akan mengelola unit organisasi harus meningkatkan keahliannya melalui pendidikan atau pelatihan.²³

²³ Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*

Perlu terus melakukan upaya dengan etos kerja professional. Tunjukkan kepada dunia, bahwa lembaga pendidikan Islam juga mampu bersaing secara benar dan sehat dengan lembaga pendidikan pada umumnya.

PENUTUP

Menjadikan lembaga pendidikan Islam bermutu bukanlah pekerjaan mudah dan murah. Mutu pendidikan Islam menjadi pertaruhan bagi kelanjutan generasi yang akan datang. Masyarakat akan mengatakan pendidikan bermutu, jika bisa dilihat dari keluarannya yang menjanjikan. Sekalipun membutuhkan biaya yang tidak murah, namun jangan berkecil hati dengan persiapan yang belum memadai. Karena tidak selamanya biaya mahal menjadikan mutu pendidikan berhasil. Kesungguhan dan kerja keras dalam mengelola pendidikan justru yang akan mengantarkan pendidikan bermutu. Untuk itu, penulis menyimpulkan apa yang telah dipaparkan di atas, yaitu:

1. Membuat pendidikan bermutu membutuhkan para pengelola dan penyelenggara bermental perubahan dan mengembangkan budaya mutu di lingkungan penidikannya.
2. Kebijakan mutu pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah jangan menjadi beban bagi penyelenggaraan pendidikan. Perlu kesungguhan dalam mengikuti pola dan system pendidikan yang dibangun oleh pemerintah. Ada standar nasional pendidikan sebagai acuan pemenuhan batas minimal dalam pelayanan pendidikan. Jika lembaga pendidikan Islam tidak memiliki kesiapan mengadopsi dan mengikuti regulasi yang ada, ada kekhawatiran anggapan pemerintah mempersulit dan menghalangi peran serta masyarakat.
3. Mental perubahan, budaya mutu, dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan sistem pendidikan yang dibangun oleh pemerintah harus dibarengi dengan manajemen yang baik dan benar. Nilai-nilai ajaran Islam bukan saja teks yang berbunyi secara verbal dalam konteks manajemen. Ajaran kita harus membumi dan kontekstual dalam proses empiris penyelenggaraan pendidikan

Islam. Sehingga perubahan yang begitu cepat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan menjadi momok yang menakutkan, tetapi anugerah yang harus disyukuri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Husein. "Kebijakan SMK Mini Jawa Timur di Iingkungan Pondok Pesantren: Analisis Perda Jawa Timur Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Kuliah Penulisan Disertasi Univiesitas Islam Negeri Sunan Ampel-Surabaya).
- Barnawi dan M. Arifin. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Arruzz Media, 2017.
- Efendi, Nur. *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren*. Yogyakarta: Teras, 2014.
- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*. Jakarta: Kecana, 2010.
- Munawir, Ahmad Warson dan Muhammad Fairuz. *AlMunawwir: Kamus Indonesia – Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Mutohar, Prim Masrokan. *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Arruzz Media, 2013.
- Nata, Abuddin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Permendiknas RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Soyomukti, Nurani. *Teori-Teori Pendidikan: dari Tradisional, (neo) Liberal, Marxis-Sosialis, hingga Postmodern*. Yogyakarta: Arruzz Media, 2015.
- Suhartono, Suparlan. *Wawasan Pendidikan*. Jogjakarta: Arruzz Media Group, 2008.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cet. VI.
Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Tilaar, H.A.R. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta:
Rineka Cipta, 2012.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.